



Evaluasi Kinerja Bisnis BPR Syariah di Provinsi Banten menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)

Dedi Mardikari¹

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: dedi.mardikari89@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) berperan penting sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah dalam mendukung UMKM dan memperluas inklusi keuangan, khususnya di Provinsi Banten. Namun, tantangan berupa keterbatasan modal, efisiensi operasional, serta dampak pandemi COVID-19 menimbulkan kesenjangan kinerja antar BPRS. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efisiensi teknis BPRS di Banten periode 2020–2024 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif evaluatif dengan data sekunder dari laporan keuangan publikasi OJK. Variabel input mencakup aset, dana pihak ketiga (DPK), dan beban operasional, sedangkan output terdiri dari pembiayaan dan pendapatan operasional. Data dari sembilan BPRS dianalisis menggunakan perangkat lunak MaxDEA 8 dengan pendekatan intermediasi. Hasil penelitian menunjukkan BPRS Wakalumi konsisten efisien penuh (100%) sepanjang periode, sedangkan Attaqwa, HIK Ciledug, dan Mustindo relatif efisien. Sebaliknya, BPRS Muamalah Cilegon, Cilegon Mandiri, dan Mulia Berkah Abadi belum optimal. Temuan menarik pada kajian ini adalah efisiensi teknis tidak selalu sejalan dengan profitabilitas. BPRS Muamalah Cilegon, meskipun tidak efisien, mencatat laba terbesar, sedangkan BPRS Wakalumi yang sangat efisien justru memiliki laba rendah. Penilaian kinerja BPRS perlu menggabungkan analisis efisiensi teknis dan profitabilitas. Efisiensi menjadi fondasi operasional, tetapi laba sangat ditentukan dari strategi bisnis, efisiensi biaya, dan pengelolaan aset.

Kata Kunci: *BPRS, DEA, Provinsi Banten*

Pendahuluan

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan nasional, khususnya dalam memperluas inklusi keuangan dan mendukung kegiatan intermediasi ditingkat lokal. Keberadaan lembaga ini hadir untuk membantu melayani para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat yang memiliki keterbatasan kepada jasa perbankan umum. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Juni 2024, terdapat 1.384 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia dan 173 unit diantaranya merupakan BPR syariah (OJK, 2024). Data ini menunjukkan besarnya potensi sekaligus tanggung jawab BPR syariah dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah nasional.

Provinsi Banten, sebagai salah satu penyangga ekonomi nasional telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19 persen (year-on-year) pada triwulan I tahun 2025 (BPS Banten, 2025). Kontribusi sektor riil seperti perdagangan, pertanian dan industri pengolahan menjadi penggerak utama. Sektor industri pengolahan sendiri mampu menyumbang 30,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten pada tahun 2023 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 213.530 orang (BPS, 2025). Kondisi makroekonomi yang positif ini merepresentasikan peluang pembiayaan yang signifikan, sekaligus menuntut kapasitas intermediasi yang kuat dan efisien dari lembaga keuangan lokal, termasuk BPR syariah.

Pada periode 2020-2024 BPR syariah atau BPRS di provinsi Banten mengalami fase yang krusial, hal ini terjadi karena transisi kinerja bisnis pasca pandemi COVID-19, di mana lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS, mengalami tekanan berat akibat penurunan kualitas pembiayaan, risiko likuiditas, dan penurunan kemampuan intermediasi. Selain itu munculnya isu ketidakmampuan sejumlah BPRS dalam memenuhi ketentuan permodalan minimum dan tingkat efisiensi operasional yang dipersyaratkan OJK. Kondisi ini menyebabkan beberapa BPRS di Indonesia, termasuk di Banten, menghadapi risiko bisnis sehingga BPRS terpaksa harus tutup, merger, dan diakuisisi. Rendahnya efisiensi menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap daya saing, profitabilitas, dan keberlanjutan bisnis BPRS. Kondisi ini membutuhkan pengukuran sebagai bentuk evaluasi mengenai sejauh mana efisiensi BPRS dalam mengelola input berupa aset, beban operasional dan dana pihak ketiga untuk menghasilkan output berupa pembiayaan dan pendapatan operasional.

Beberapa kajian terdahulu mengenai evaluasi kinerja bank syariah di Indonesia telah dilakukan dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), akan tetapi sebagian besar penelitian berfokus pada bank umum syariah seperti penelitian yang dilakukan oleh Setyono et al., (2021), sedangkan penelitian yang secara spesifik menganalisis BPR Syariah pada tingkat regional masih sangat terbatas, terutama di Provinsi Banten yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan provinsi lain. Oleh karena itu, kajian ini dapat mengisi kekosongan kajian terkait evaluasi kinerja pada BPRS di Banten sebagai representasi lembaga keuangan syariah mikro yang berperan penting dalam pembiayaan sektor UMKM, selain itu, penggunaan DEA dalam kajian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai kinerja yang aktual pada lembaga ini.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif evaluatif untuk mengukur efisiensi kinerja bisnis sembilan BPRS di Provinsi Banten selama periode 2020–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah *Data Envelopment Analysis* (DEA)

dengan pendekatan *output-oriented* dan model *Variable Return to Scale* (VRS). Model ini dipilih karena mampu menangkap variasi skala usaha antar BPRS dan menilai kemampuan masing-masing BPRS dalam memaksimalkan output (pembiayaan dan pendapatan operasional) dari input yang tersedia (aset, dana pihak ketiga, dan beban operasional).

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari laporan keuangan tahunan BPRS dan publikasi resmi OJK. Pengumpulan data dilakukan secara purposive terhadap BPRS yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu konsistensi publikasi laporan keuangan, terdaftar di OJK dan BI, serta beroperasi aktif selama periode penelitian.

Hasil pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak MaxDEA 8, yang menghasilkan skor efisiensi relatif untuk masing-masing BPRS. Skor efisiensi ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan efisiensi di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif dan aplikatif terhadap efisiensi intermediasi keuangan syariah di tingkat BPRS.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Kinerja Bisnis BPRS di Provinsi Banten Menggunakan Metode DEA Pada Tahun 2020 – 2024

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat efisiensi antar BPRS selama periode pengamatan. Beberapa BPRS mampu mencapai efisiensi penuh (100%) secara konsisten, menunjukkan kemampuan optimal dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, sementara sebagian lainnya masih menghadapi ketidakefisienan dalam pemanfaatan input untuk menghasilkan output secara maksimal. Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut disajikan hasil efisiensi menggunakan MaxDEA.8 kinerja bisnis masing-masing BPRS di Provinsi Banten tahun 2020 – 2024:

Tabel 1
Hasil Perhitungan Efisiensi BPRS di Banten Tahun 2020 – 2024

No	Nama BPRS	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata
1	BPRS ATTAQWA	100%	100%	100%	100%	97.45%	99.49%
2	BPRS Berkah Ramadhan	77.55%	75.39%	72.63%	78.85%	100%	80.88%
3	BPRS Cilegon Mandiri	100%	63.21%	52.49%	78.20%	93.54%	77,48%
4	BPRS HIK	100%	97.41%	100%	100%	100%	99,48%
5	BPRS Mustindo	100%	100%	97.01%	100%	98.07%	99,01%
6	BPRS Mu'amalah Cilegon	69.27%	68.54%	71.70%	73.26%	77.45%	72,04%

7	BPRS Mulia Berkah Abadi	72.68%	69.36%	77.78%	87.60%	62.16%	73.91%
8	BPRS Wakalumi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	BPRS Rizky Barokah					77%	77%
Rata Rata Pertahun		89,93%	84,23%	83,95%	89.73%	91.08	

Sumber: Data diolah menggunakan MaxDEA.8

Dalam konteks analisis DEA, skor efisiensi 100% menunjukkan bahwa kinerja BPRS telah menggunakan input secara optimal untuk menghasilkan output maksimal, sehingga dikategorikan sebagai efisien secara relatif (skala Efisiensi). Sebaliknya, skor di bawah 100% menandakan adanya ketidakefisienan (skala inefisiensi), di mana BPRS tersebut masih memiliki ruang perbaikan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh bahwa dari 9 BPRS di Banten terdapat 8 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang menunjukkan tingkat efisien pada periode 2020-2024. Beberapa BPRS seperti BPRS ATTAQWA, BPRS Wakalumi, BPRS HIK, dan BPRS Mustindo berhasil mempertahankan tingkat efisiensi tinggi, dengan rata-rata di atas 99%. Khusus BPRS Wakalumi, bank ini konsisten mencatat efisiensi sempurna (100%) selama lima tahun berturut-turut.

Kondisi terbalik justru dialami oleh BPRS Mu'amalah Cilegon dan BPRS Mulia Berkah Abadi menunjukkan kinerja terendah dengan rata-rata efisiensi masing-masing 71,44% dan kecenderungan penurunan di tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan masih adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan beban operasional, aset, dan produktivitas pembiayaan.

BPRS Cilegon Mandiri dan BPRS Berkah Ramadhan menempati posisi menengah, dimana BPRS Cilegon Mandiri sempat turun drastis pada 2022 namun mampu memperbaiki kinerja di tahun berikutnya, sedangkan BPRS Berkah Ramadhan berhasil meningkat signifikan menjadi efisien penuh pada 2024 dan BPRS Rizky barokah yang belum bisa dibandingkan karena keterbatasan laporan keuangan hanya tersedia di tahun 2024.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian BPRS sudah mampu mengelola sumber daya secara optimal, namun sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan dalam strategi pengelolaan aset, pembiayaan, serta penghimpunan DPK untuk mencapai efisiensi yang berkelanjutan. Adapun penurunan tingkat efisiensi yang terjadi pada delapan BPRS di Provinsi Banten disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penggunaan input dan pencapaian output. Dalam kondisi ideal, seluruh input yang digunakan diharapkan dapat diolah secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang maksimal. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian BPRS belum mampu mengelola input tersebut secara optimal sehingga berdampak pada rendahnya tingkat efisiensi.

Selain melakukan evaluasi kinerja melalui DEA, dalam kajian ini penulis mencoba membandingkan laporan laba bersih BPRS untuk melihat dari sisi profitabilitas. Berikut ini adalah laporan kinerja bisnis yang merujuk pada laba bersih pada BPRS di Provinsi Banten.

Tabel 2.

Laporan Publikasi OJK 9 BPRS di Banten Rasio Efisiensi Tahun 2024

No	Nama BPRS	RASIO EFISIENSI (%) TAHUN 2024	
		Laba bersih	Rasio Efisiensi
1	BPRS Muamalah Cilegon	2.483.406.002	38,44%
2	BPRS Cilegon Mandiri	(1.894.162.853)	-12,54%
3	BPRS Berkah Ramadhan	1.283.306.226	31,45%
4	BPRS Attaqwa	(5.654.160.352)	-51,01%
5	BPRS Wakalumi	287.476.419	9,37%
6	BPRS Harta Insan Karimah (HIK)	8.435.557.314	16,86%
7	BPRS Mulia Berkah Abadi	1.338.414.871	6,31%
8	BPRS Mustindo	(3.440.679.384)	-57,42%
9	BPRS Rizky Barokah	1.108.845.386	18,38%

Sumber: Data diolah dari OJK, 2024.

Berdasarkan perhitungan rasio laba bersih terhadap beban operasional, BPRS Muamalah Cilegon tercatat sebagai lembaga dengan rasio efisiensi tertinggi, yaitu sebesar 38,44%. Artinya, dalam konteks akuntansi keuangan, BPRS ini mampu menghasilkan laba bersih terbesar dibandingkan total beban operasional yang dikeluarkan seperti pada hasil Laporan Keuangan Tahun 2024. Akan tetapi, dalam hasil pengukuran DEA, justru sebaliknya BPRS Muamalah Cilegon menempati posisi paling tidak efisien, dengan rata-rata efisiensi hanya 72,04% selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara efisiensi teknis-operasional (DEA) dan profitabilitas (rasio keuangan).

Perbedaan hasil ini merupakan hal yang wajar terjadi karena DEA tidak mempertimbangkan nilai laba sebagai output, melainkan menekankan pada proses intermediasi input menjadi output secara produktif. Sementara itu, laba bersih dipengaruhi oleh berbagai komponen lain seperti pendapatan non-operasional, efisiensi biaya, hingga kebijakan akuntansi dan perpajakan yang tidak menjadi fokus DEA. Sebagai contoh, BPRS Muamalah Cilegon mungkin berhasil mengendalikan beban dan meningkatkan margin pendapatannya secara efektif, sehingga menghasilkan rasio laba bersih yang tinggi. Namun dalam konteks DEA, jika penggunaan aset dan DPK-nya dinilai kurang optimal dalam menghasilkan pembiayaan dan pendapatan operasional, maka skor efisiensinya tetap rendah.

Dengan demikian, kajian ini merekomendasikan pentingnya pendekatan ganda dalam mengevaluasi kinerja BPRS. DEA memberikan pandangan mengenai efisiensi proses dan produktivitas antar variabel input-output, sedangkan analisis laba rugi dan rasio keuangan memberikan perspektif keuntungan dan keberlanjutan usaha. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kinerja bisnis BPRS.

Selain itu, dari hasil perhitungan DEA terdapat temuan yang menarik terkait kinerja BPRS Wakalumi, dimana hasil evaluasi kinerja bisnis menunjukkan sangat efisien, yang memperoleh nilai 100% secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024, artinya secara teknis, lembaga ini dinilai efisien penuh dalam mengelola input (aset, DPK, dan beban operasional) untuk menghasilkan output (pembiayaan dan pendapatan operasional). Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Wakalumi memiliki struktur operasional yang proporsional, di mana sumber daya yang dimiliki mampu digunakan secara optimal untuk menghasilkan pembiayaan dan pendapatan. Dalam terminologi DEA, posisi efisien ini menunjukkan bahwa BPRS Wakalumi menjadi *benchmark* bagi BPRS lain yang berada di bawah *frontier* efisiensi.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang laporan laba rugi, khususnya rasio laba bersih terhadap beban operasional, posisi BPRS Wakalumi tidak menempati menjadi paling efisien. Dengan nilai rasio efisiensi sebesar 9,37%, yang artinya bank ini hanya menempati peringkat menengah ke bawah dalam kemampuan menghasilkan keuntungan dari biaya yang dikeluarkan. Kajian ini mengindikasikan adanya efisiensi teknis tidak selalu menunjukkan efisien atau profitabilitas maksimal. Dalam artian, BPRS Wakalumi berhasil menjaga struktur input dan output dengan sangat baik (terlihat dari nilai DEA 100%), namun mungkin belum mengoptimalkan sisi margin keuntungan atau efisiensi beban lain secara akuntansi untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi.

BPRS Wakalumi menjadi contoh lembaga yang efisien secara sistemik dan operasional, tetapi masih memiliki ruang untuk meningkatkan efisiensi dari sisi profitabilitas, misalnya dengan meningkatkan pendapatan non-operasional, efisiensi pemasaran, atau optimalisasi beban administratif. Dalam praktiknya, hal ini sangat penting bagi manajemen, karena bank yang efisien secara teknis tetapi tidak cukup menguntungkan tetap menghadapi tantangan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, kajian terkait evaluasi efisiensi tidak hanya berorientasi pada DEA, tetapi juga diseimbangkan dengan indikator keuangan yang mencerminkan daya saing keuntungan dan kemandirian usaha.

Selain itu, BPRS Berkah Ramadhan juga menunjukkan kinerja yang baik secara keuangan dengan rasio laba 31,45% dan skor DEA yang meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola yang mampu meningkatkan efisiensi secara berimbang, baik dari sisi proses maupun hasil. Ini merupakan contoh positif dari integrasi antara efisiensi teknis dan finansial. Kemudian, pengukuran terhadap BPRS Rizky Barokah, meskipun belum memiliki data DEA lengkap, akan tetapi kinerja keuangan yang sehat dengan rasio efisiensi 18,38%, mengindikasikan potensi profitabilitas yang baik dan perlu didukung dengan penguatan efisiensi teknis agar mampu bersaing dalam jangka panjang.

Selanjutnya, BPRS Harta Insan Karimah (HIK) memiliki laba bersih tertinggi secara nominal, namun rasio efisiensinya hanya 16,86%. Penulis melihat bahwa meskipun skala usaha besar, efisiensi biaya belum optimal. Dengan pengelolaan biaya yang lebih tepat, rasio keuangan bank ini dapat ditingkatkan lebih tinggi. BPRS Mulia Berkah Abadi memiliki rasio efisiensi keuangan rendah (6,31%) dengan skor DEA yang fluktuatif, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara input dan output dari sisi keuangan. Sehingga perlu adanya restrukturisasi strategi operasional dan penajaman efisiensi pembiayaan.

BPRS Cilegon Mandiri mengalami kerugian dengan rasio efisiensi negatif (-12,54%), meskipun secara DEA menunjukkan tingkat efisiensi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran bank belum dapat menghasilkan nilai tambah yang cukup. Perlu dilakukan efisiensi biaya yang menyeluruh dan reformulasi strategi penyaluran dana. BPRS Attaqwa menempati posisi lebih kritis, dengan rasio kerugian yang besar (-51,01%) meskipun sempat mencatat skor DEA sempurna di awal periode. Akan tetapi, kondisi efisiensi teknis yang tidak diiringi oleh efisiensi keuangan menjadi ancaman terhadap keberlanjutan lembaga ini.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 BPRS Mustindo memiliki tingkat efisiensi terendah dengan rasio -57,42%, meskipun skor DEA bank ini cukup tinggi, kerugian besar secara keuangan menunjukkan bahwa strategi operasional yang dijalankan belum efektif. Menurut penulis, bank ini memerlukan penanganan serius melalui evaluasi menyeluruh atas struktur pembiayaan, efisiensi beban, dan manajemen risiko.

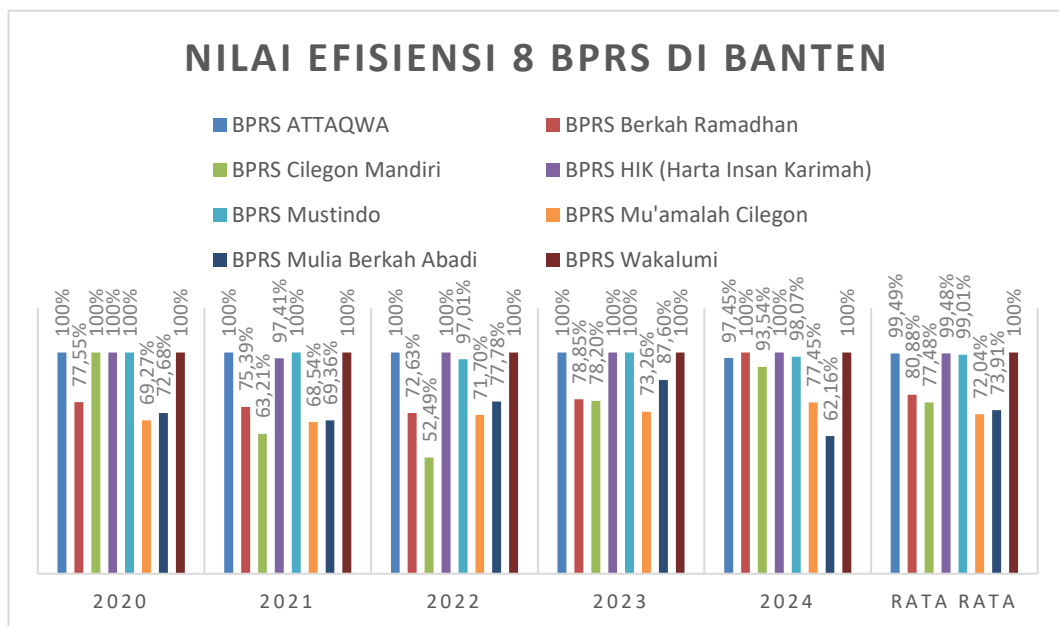
Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi kinerja bisnis pada dunia perbankan perlu dilakukan dua pendekatan agar memberikan pandangan yang komprehensif baik dari sisi efisiensi berdasarkan input dan output maupun efektivitas pencapaian hasil yang diperoleh dari keuntungan bersih. Integrasi kedua pendekatan ini sangat penting agar evaluasi yang dilakukan bersifat menyeluruh, objektif, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh regulator, pengawas, maupun manajemen BPRS itu sendiri.

Perbandingan tingkat kinerja bisnis BPRS dengan menggunakan metode DEA pada tahun 2020 – 2024

Berdasarkan uraian di atas, perbandingan tingkat kinerja bisnis BPRS dengan menggunakan metode DEA pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3.

Perbandingan Tingkat Kinerja Bisnis BPRS dengan menggunakan Metode DEA pada Tahun 2020 – 2024



Sumber : Data Diolah Menggunakan MaxDEA.8

BPRS Wakalumi tercatat sebagai satu-satunya BPRS yang mencapai skor efisiensi sempurna (100%) secara konsisten selama lima tahun berturut-turut (2020–2024). Hal ini menandakan bahwa BPRS Wakalumi mampu mengelola sumber daya secara optimal dan stabil dalam jangka panjang. Model operasional yang efisien ini dapat dijadikan rujukan bagi BPRS lain dalam menciptakan sistem manajemen yang terukur dan hemat biaya.

BPRS ATTAQWA, HIK Ciledug, dan Mustindo juga menunjukkan efisiensi tinggi, dengan skor rata-rata berturut-turut 99,49%, 99,48%, dan 99,01%. Meskipun terjadi sedikit fluktuasi nilai pada tahun-tahun tertentu, secara umum ketiganya mempertahankan produktivitas tinggi dalam mengonversi input menjadi output. Hal ini menunjukkan pengendalian biaya yang baik, serta optimalisasi penyaluran pembiayaan dan perolehan pendapatan.

Sementara itu, BPRS Berkah Ramadhan mencatat rata-rata efisiensi 80,88%. Kinerja efisiensinya menunjukkan peningkatan signifikan, dari kisaran 70% di awal periode menjadi 100% pada 2024. Ini mengindikasikan adanya pembenahan internal atau peningkatan efektivitas operasional yang mulai berjalan baik.

BPRS Cilegon Mandiri, Muamalah Cilegon, dan Mulia Berkah Abadi masing-masing mencatat rata-rata efisiensi 77,48%, 72,04%, dan 73,91%. Skor yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa ketiganya masih menghadapi tantangan dalam mengelola beban operasional, mengoptimalkan aset, atau meningkatkan output dari segi pembiayaan dan pendapatan. Kondisi ini tercermin dari hasil keuangan: BPRS Cilegon Mandiri mencatat kerugian sebesar Rp 1.894.162.853, sedangkan BPRS Muamalah Cilegon berhasil mencatat laba bersih Rp 2.483.406.002 meskipun efisiensinya tergolong rendah

tapi BPRS Muamalah Cilegon justru mengalami keuntungan laba yang cukup besar, artinya BPRS Muamalah Justru tumbuh dengan organik dengan grafik yang cukup Progresif. Hal ini mengindikasikan bahwa laba bersih tidak selalu mencerminkan efisiensi operasional yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut hasil evaluasi efisiensi kinerja bisnis menggunakan metode DEA pada tahun 2021, tercatat bahwa terdapat tiga BPRS di Provinsi Banten yang masuk dalam kategori “Kurang Efisien” dengan tingkat kinerja “Kurang Baik”, yaitu BPRS Muamalah Cilegon, BPRS Mulia Berkah Abadi, dan BPRS Cilegon Mandiri. Pada tahun tersebut, BPRS Muamalah Cilegon memperoleh skor efisiensi sebesar 68,54%, BPRS Mulia Berkah Abadi sebesar 69,36%, dan BPRS Cilegon Mandiri mencatat skor efisiensi sebesar 63,21%. Skor tersebut mencerminkan bahwa ketiga BPRS tersebut belum mampu memanfaatkan sumber daya (input) secara maksimal dalam menghasilkan output yang optimal.

Kondisi tidak efisien ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya optimalisasi aset, beban operasional yang tinggi, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang belum maksimal, serta penyaluran pembiayaan yang belum sepenuhnya produktif. Selain itu, tingkat pendapatan operasional yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa output yang dihasilkan belum sebanding dengan potensi input yang telah dimiliki.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa kinerja BPRS di Provinsi Banten selama periode 2020–2024 bervariasi. Beberapa BPRS seperti Wakalumi, Attaqwa, HIK, dan Mustindo sudah menunjukkan efisiensi tinggi, bahkan Wakalumi konsisten efisien penuh selama lima tahun. Sebaliknya, BPRS Muamalah Cilegon, Cilegon Mandiri, dan Mulia Berkah Abadi masih menghadapi inefisien dalam memanfaatkan aset, dana pihak ketiga, dan beban operasional. Temuan lain menunjukkan bahwa efisiensi teknis tidak selalu sejalan dengan profitabilitas. BPRS Muamalah Cilegon, misalnya, memiliki laba bersih tertinggi tetapi efisiensinya rendah, sedangkan BPRS Wakalumi sangat efisien namun labanya kecil. Hal ini menandakan bahwa efisiensi teknis penting sebagai fondasi, tetapi profitabilitas tetap bergantung pada strategi bisnis dan efisiensi biaya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja BPRS sebaiknya tidak hanya mengandalkan analisis DEA, tetapi juga dipadukan dengan evaluasi profitabilitas. Kombinasi keduanya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan keberlanjutan BPRS di Banten

Referensi

- BPS. (2025). *Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Banten 2023*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- BPS Banten. (2025). *Berita Resmi Statistik*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Handriani, E. (2025). Determinant of profitability Islamic banks. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 6(1), 79–99. <https://doi.org/10.46367/jps.v6i1.2373>
- Kiki Rismayati & Shinta Maharani. (2022). Pengaruh Pemilihan Metode Pengakuan Pendapatan Istishna' Terhadap Return On Asset (ROA) (Studi PT BPR Syariah Mulia Berkah Abadi Periode Tahun 2017-2019). *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1), 61–78. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.532>
- Mutiara, P. (2022). Pengaruh Pendapatan dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 244. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.396>
- OJK. (2024). *Statistik Perbankan Indonesia -Juni 2024*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Septiani, E., & Rani, L. N. (2020). Analisis Tingkat Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Periode 2012-2018 Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (Dea). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(7), 1378. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20207pp1378-1390>
- Setyono, F., N.A.I, Y., Ilmundhita, S., & Mujib, A. (2021). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *I-FINANCE: A Research Journal on Islamic Finance*, 07(01), 11–30.
- Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 270–285. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.229>
- Wastuti, W., Husin, H. A., & Fitrijanto, A. (n.d.). *Faktor-faktor yang Menentukan Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia*